

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK
PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA
PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN
NO.63/PID.SUS/TPK/2017/PN-JAKPUS)**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Hukum Program Magister
Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia**

Oleh:

WISNU PRABOWO

2002190101



**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TAHUN 2022**



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Prabowo

NIM : 2002190101

Program Studi : Program Magister Hukum

Fakultas : PPS

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang ber judul “ PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO.63/PID.SUS/TPK/2017/PN-JAKPUS)” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 28 Nopember 2022



Wisnu Prabowo

NIM 2002190101



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
MAGISTER

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

**PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH**

(STUDI KASUS PUTUSAN NO.63/PID.SUS/TPK/2017/PN-JAKPUS)

Nama : Wisnu Prabowo
NIM : 2002190101
Program Studi : Program Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan guna mencapai gelar magister pada program studi magister hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta: 28 November 2022

Pembimbing I

Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L.
NIP/NIDN: 211036/8931720021

Pembimbing II

Dr. Armunanto Hutahean, S.E., S.H., M.H.
NIP/NIDN: 8986240022

Ketua
Program Studi Hukum Program Magister

Dr. Wiyik Sri Widiarty, S.H., M.H.
NIP/NIDN: 141104/0327096504

Direktur
Program Pascasarjana

Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., P.A.
NIP/NIDN: 001473/0320116402



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
PROGRAM PASCA SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
MAGISTER

PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada tanggal 28 November 2022 telah diselenggarakan sidang tugas akhir untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Strata Dua pada Program Studi Hukum Program Magister Program Pascasarjana, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

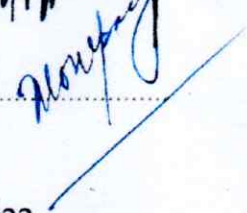
Nama : Wisnu Prabowo

NIM : 2002190101

Program Studi : Program Magister Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Termasuk ujian tugas akhir yang berjudul “PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO.63/PID.SUS/TPK/2017/PN-JAKPUS)”.

Nama Penguji	Jabatan Dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1.Dr.drs.Tatok Sudjiarto,S.H.,M.H.,M.T.L.	Sebagai Ketua	
2.Dr.Armunanto Hutahaean,S.E.,S.H.,M. H.	Sebagai Anggota	
3.Prof.Dr.Mompang L.Panggabean,S.H.,M.Hum.	Sebagai Anggota	

Jakarta 28 Nopember 2022



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Pernyataan dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wisnu Prabowo

NIM : 2002190101

Fakultas : Program Pasca Sarjana

Program Studi : Magister Hukum

Jenis Tugas Akhir : Tesis

Judul : PERAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH (STUDI KASUS PUTUSAN NO.63/PID.SUS/TPK/2017/PN-JAKPUS)

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 28 Nopember 2022



Wisnu Prabowo
NIM 2002190101

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan rahmatNya kepada peneliti sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan tesis dengan judul “Peran Penyidik Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Putusan No.63/Pid.Sus/Tpk/2017/PN-Jakpus)”.

Peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna dan masih memiliki kekurangan. Peneliti menyadari bahwa tesis ini dapat selesai karena bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, MBA, selaku rektor Universitas Kristen Indonesia beserta seluruh jajaran pimpinan dan staf Universitas Kristen Indonesia sebagai tempat peneliti mengikuti pendidikan pascasarjana magister hukum.
2. Prof. Dr. dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd., PA, selaku direktur program pascasarjana magister hukum pada Universitas Kristen Indonesia.
3. Dr. Wiwik Sri Widiarty, S.H., M.H., selaku kepala program studi magister hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Dr. Drs. Tatok Sudjiarto, S.H., M.H., M.T.L. selaku pembimbing pertama
5. Dr. Armunanto Hutahaean, S.E., S.H., M.H. selaku pembimbing kedua
6. Prof. Mompang L Panggabean, S.H., M.Hum. selaku dosen penguji
7. Keluarga tersayang, istri dan anak-anak yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi serta doa dan selalu mendampingi dalam masa sulit dan bahagia.
8. Rekan-rekan mahasiswa Pascasarjana program studi magister hukum yang telah banyak memberikan pencerahan sebagai mitra diskusi dan saran untuk mencapai keberhasilan program studi.

Akhir kata, peneliti berharap Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu peneliti. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkait tindak pidana korupsi pada bidang pengadaan barang dan jasa.

Jakarta, 28 November 2022



Wisnu Prabowo

DAFTAR ISI

Pernyataan Keaslian Tesis.....	i
Persetujuan Dosen Pembimbing	ii
Persetujuan Tim Penguji Akhir	iii
Pernyataan publikasi.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi
Abstrak.....	viii
Abstract.....	ix
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Kerangka Teori dan Konsep.....	8
1.5. Metode Penelitian.....	15
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	30
2.1. Kerangka Teoritis.....	30
2.1.1. Pengertian Korupsi.....	30
2.1.2. Tindak Pidana.....	39
2.1.3. Teori Struktur Hukum.....	41
2.1.4. Pengadaan Barang dan Jasa.....	43
2.1.5. Penyidik Polri.....	48

BAB III

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PUTUSAN NOMOR 63 / PIDANA KHUSUS / TPK / 2017 / PN - JAKPUS.....55

3.1. Posisi Kasus.....55

3.1.1. Kronologis.....55

3.1.2. Dakwaan.....62

3.1.3. Tuntutan.....63

3.1.4. Fakta Hukum.....64

3.1.5. Pertimbangan Hakim.....76

3.2. Analisis Kasus.....85

BAB IV

PERAN PENYIDIK POLRI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....89

4.1. Hambatan-hambatan Penyidik Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipidkor) terkait dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN- JAKPUS.....89

4.2. Proses Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Penyidik Polri dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi (tipidkor) terkait dengan putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN- JAKPUS.....91

BAB V

PENUTUP.....102

5.1. Kesimpulan.....102

5.2. Saran.....104

DAFTAR PUSTAKA.....106

ABSTRAK

Korupsi telah menjadi budaya di seluruh bidang pemerintahan di Indonesia. Kenyataan ini membuat Indonesia menduduki posisi teratas kasus korupsi di wilayah Asia Tenggara. Salah satu bidang yang dianggap rawan korupsi adalah pengadaan barang dan jasa. Proses penyidikan tindak pidana korupsi oleh Penyidik Polri terkait dengan Pengadaan barang dan jasa tidak semudah dari penyidikan biasa, hal ini dikarenakan Kejaksaan juga melakukan proses penyidikan sekaligus proses penuntutan, tentunya proses penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik Polri sesuai sistem peradilan pidana berkas perkara harus melalui Kejaksaan, salah satu hambatannya adalah dalam proses koordinasi dimana Kejaksaan lebih mengutamakan perkara korupsi yang ditangani sendiri. Adapun hambatan lainnya dalam unsur pembuktian tindak pidana korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, harus adanya perhitungan kerugian negara, dalam perkara korupsi pengadaan barang dan jasa di Sudin PU kota Jakarta Timur sebagaimana putusan vonis hakim pada perkara tindak pidana korupsi Nomor 63/Pidana Khusus/TPK/2017/PN-JAKPUS, dimana peran penting dalam menentukan perhitungan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), mengingat tidak sebandingnya jumlah auditor dengan jumlah perkara dalam penghitungan kerugian keuangan negara diperlukan waktu yang cukup lama, dimana melebihi ketentuan batasan waktu dalam mata anggaran penyidikan korupsi oleh Polri, sehingga adanya tidak keseimbangan antara biaya penyidikan yang dikeluarkan negara dengan putusan atau vonis Pengadilan terhadap terdakwa pidana korupsi tersebut, maka dari awal proses penyidikan mulai muncul berbagai intervensi baik dari internal maupun dari eksternal yang menginginkan perkara tindak korupsi tersebut dihentikan, Oleh karena itu Penyidik Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi dituntut memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi.

Kata kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang dan Jasa, Penyidik Polri.

ABSTRACT

Corruption has become a culture in all areas of government in Indonesia. This fact makes Indonesia occupy the top position in corruption cases in the Southeast Asian region. One area that is considered prone to corruption is the procurement of goods and services. The aims of this study is to classify the obstacles found by Police investigators and to detail the process that Police investigators went through until the publication of P21 by the public prosecutor until it was decided by the Central Jakarta District Court with the decision Number 63/Special Crime/TPK/2017/PN.JAK -PUSSY. The method used in this study is a normative method because the instruments used are document studies (court decisions) and interviews. The results of the study indicate that the obstacles received by investigators in the process of investigation, investigation to the judge's verdict on the corruption case Number 63/Special Crime/TPK/2017/PN-JAKPUS are 1) the length of time in the process of calculating state losses by BPKP, because there are only 2 institutions that can determine state losses, namely BPK and BPKP as well as the limited number of auditors while many cases of corruption cases from other law enforcement officials that must be calculated state losses; (2) Communication with the party with the Public Prosecutor (JPU) who was cut off in order to equal perception in handling corruption cases so that the case file did not go back and forth/P19 which took a long time to complete the case file documents until it was declared complete/P21. Attention and Connection Factors In this case, investigators have received various interventions from the connection known by the parties involved and in essence requested that the case be assisted and stopped the process. Furthermore, the process of investigation and investigation carried out by Police investigators in the corruption case Number 63/Special Crime/TPK/2017/PN-JAKPUS are 1) Investigators obtain information related to corruption cases at the East Jakarta Public Works Sub-Department. The information is in the form of a fictitious contract in the procurement of hot-mix and asphalt emulsion goods/materials; (2) The investigator issues an investigation warrant and invites clarification to the Head of the East Jakarta City Public Works Sub-Department to conduct interviews with related parties and conduct document analysis as well as observations and checks to locations that are objects of work at the East Jakarta City Public Works Sub-Department; (3) Investigators make summons to witnesses, search and confiscate evidence; (4) Investigators coordinate with BPKP to calculate losses on State Finances. The loss is determined by the BPKP of IDR 35,077,258,558.00 (Thirty Five Billion Seventy Seven Million Two Hundred Fifty Eight Thousand Five Hundred Fifty Eight Rupiah); (5) Investigators carry out case titles to raise the status of the alleged perpetrators as suspects; (6) The investigator delegates the case file to the Public Prosecutor (Prosecutor) for research; (7) Investigators complete missing case files; (8) Investigators submit the suspect and evidence to the Public Prosecutor (JPU) for prosecution; (9) Sentencing by the court

Keywords: *Corruption Crimes, Procurement of Goods and Services, Police Investigators.*